

Kajian Penggunaan Konsep Smart Village dalam Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan

Yusup Nugraha, Saraswati, Irland Fardani

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

upnugraha@gmail.com, ptatatesispwk19@gmail.com, Irlan128@gmail.com

Abstract. One of the strategies for developing rural areas is with a growth center to spur the surrounding villages. The research objectives are (1) to examine the structure of growth center villages, (2) to examine the application of smart village implementation, (3) to examine the relationship between smart villages and growth center villages. The study used a descriptive analysis approach, quantitative in nature based on secondary data analysis. The research area covers all villages in Ciwidey District. The analysis technique uses location accessibility analysis, gravity, schalogram, centrality index, hierarchical cluster method and spearman level correlation analysis. The result was Ciwidey Village as the main DPP, Panyocok Village alternative DPP and other villages as supporters. In the smart village concept, Ciwidey Village is the village with the highest smart village application, then Lebakmuncang Village and other villages still need to be improved. The connection between the DPP and the smart village concept is that the two can influence each other, especially in the service hierarchy and strategic location. From these conditions, a growth center with a smart village can be realized to align village potential with current global developments, especially technology, so that the quality of life for rural communities increases.

Keywords: Growth Center, Smart Village.

Abstrak. Salah satu strategi pembangunan wilayah perdesaan adalah dengan pusat pertumbuhan untuk memacu desa-desa sekitarnya. Tujuan penelitian (1) mengkaji struktur desa pusat pertumbuhan, (2) mengkaji aplikasi penerapan smart village, (3) mengkaji hubungan smart village dengan desa pusat pertumbuhan. Penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif, bersifat kuantitatif berbasis analisis data sekunder. Lingkup daerah penelitian seluruh desa di Kecamatan Ciwidey. Teknik analisis menggunakan analisis aksesibilitas lokasi, gravitasi, skalogram, indeks sentralitas, cluster metode hirarki serta analisis korelasi tata jenjang spearman. Hasilnya Desa Ciwidey sebagai DPP-Utama, Desa Panyocokan sebagai DPP-Alternatif dan desa lain sebagai pendukung. Pada konsep smart village Desa Ciwidey menjadi desa paling tinggi aplikasi smart village, kemudian Desa Lebakmuncang serta desa lain masih perlu dilakukan peningkatan. Keterkaitan DPP dan konsep smart village adalah keduanya dapat saling mempengaruhi khususnya pada hirarki pelayanan serta lokasi yang strategis. Dari kondisi tersebut pusat pertumbuhan dengan smart village dapat diwujudkan untuk menyelaraskan potensial desa dengan perkembangan global saat ini khususnya teknologi, sehingga kualitas kehidupan masyarakat wilayah perdesaan meningkat.

Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan, Smart Village.

1. Pendahuluan

Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat memiliki jumlah 3.775.279 penduduk atau sekitar 7,66% dari 48.683.700 [3]. Selain itu, orientasi pergerakan di Kabupaten Bandung sesuai pada data Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung disebutkan bahwa sebanyak 3.534.111 jiwa kedua terbesar di Jawa Barat dengan 7,56% yang berorientasi pusat di bagian utara yang dipengaruhi oleh aksesibilitas dekat dengan pusat kota, yaitu Kota Bandung, sehingga membuat penduduk lebih tertarik tinggal di bagian utara Kabupaten Bandung, dengan kondisi tersebut pembangunan daerah lebih memprioritaskan di bagian utara yang juga disebabkan karena kota memberikan peluang lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih menjanjikan dari sisi pendapatannya dibandingkan dengan wilayah perdesaan [7]. Oleh karena itu, motif ekonomi cenderung mendominasi peristiwa perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa faktor yang menyebabkan perkembangan suatu daerah umumnya pertambahan penduduk baik secara alami maupun karena migrasi desa-kota atau perubahan kegiatan usaha dan kehidupan penduduk yang berkembang [2].

Salah satu pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Bandung, yaitu dengan merancang suatu kawasan agropolitan. Kawasan tersebut terdiri dari Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabaki dan Pasirjambu. Kecamatan Ciwidey yang termasuk satu dari tiga kecamatan ke dalam Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2007, diimplementasikan tahun 2008-2012, dan dievaluasi pada 2013-2016. Dampak dari implementasi masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey adalah program pengembangan agropolitan berdampak positif bagi karakteristik fisik dan sosial, namun berdampak negatif bagi karakteristik ekonomi [1]. Karakteristik fisik menunjukkan bahwa hasil pembangunan fisik Kawasan Ciwidey berdampak pada kemudahan transportasi dan pengiriman hasil pertanian, peningkatan hasil produksi pertanian, dan mampu memberi branding produk olahan pertanian sebagai oleh-oleh khas Kawasan Agropolitan Ciwidey [1]. Untuk karakteristik sosial, pengembangan kawasan agropolitan Ciwidey berdampak pada peningkatan hasil pertanian karena terdapat penguatan kelembagaan petani melalui manajemen partisipatif. Sedangkan untuk karakteristik ekonomi, pengembangan agropolitan berdampak pada penurunan hasil produksi sawah karena ada petani yang beralih dalam komoditas yang ditanam sejalan dengan adanya perluasan kemitraan dengan pengusaha retail. Jika dilihat secara keseluruhan, implementasi pengembangan kawasan agropolitan Ciwidey berdampak cukup baik bagi peningkatan kesejahteraan petani mengingat output yang dihasilkan adalah positif. Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha, pembiayaan, dan perluasan akses jaringan dalam pengembangan produk unggulan desa [1]. Hal ini sejalan dengan ungkapan Uphoff (1989) bahwa lembaga berperan penting dalam mendukung kegiatan agribisnis. Lebih lanjut, terkait upaya penguatan ekonomi, diperlukan upaya penguatan manajemen pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi (Prasetya, Suyadi, Bisri, & Soemarmo, 2015). Serupa, Farhanah & Prajanti (2015) juga berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, penguatan institusi, dan input produksi diperlukan untuk mengembangkan kawasan agropolitan.

Selain itu, perkembangan perekonomian daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kecamatan Ciwidey pada tahun 2015 sampai 2018 cenderung mengalami kenaikan, baik menggunakan harga berlaku maupun harga konstan. Informasi detail mengenai PDRB tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. PDRB Kecamatan Ciwidey (Jutaan)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2015	235.194,42	167.982,80
2	2016	402.852,08	272.190,47
3	2017	551.965,23	357.059,76
4	2018	587.800,85	359.867,69

Sumber : Hasil Olahan, 2020 dan Kabupaten Bandung dalam Angka 2017-2019.

Melihat pada tabel di atas, PDRB pada sektor pertanian di Kecamatan Ciwidey untuk harga berlaku atau sebaran dan struktur ekonominya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015-2016 sebesar 71,28% dan yang tekecil dari tahun 2018-2019 sebesar 6,49%. Sedangkan untuk harga konstan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015-2016 sebesar 62,03% dan untuk kenaikan terkecil dari tahun 2017-2018 sebesar 0,79%. Besaran PDRB sektor pertanian tersebut tentunya dipengaruhi oleh kuantitas produksi pertanian yang ada. Kecamatan Ciwidey memiliki jumlah komoditas pertanian sebanyak 22 komoditas dengan produksi terbesar adalah padi sawah sebesar 18 ribu ton dan juga jagung sebesar 477 ton pada tahun 2018.

Akan tetapi dengan kuantitas produksi pertanian yang melimpah serta variatif komoditasnya, kondisi Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kecamatan Ciwidey berada di bawah rata-rata kabupaten dengan nilai IPM 75,11 atau urutan ke 23 dari 31 kecamatan [7]. Kemudian untuk tingkat kemiskinan rumah tangga (rt) di Kecamatan Ciwidey termasuk ke dalam kategori sedang untuk skala Kabupaten Bandung dengan persentase sebesar 33,68% atau sebanyak 9.126 rt dari 27.095 rt (Dinsos Kab. Bandung, 2017). Kemudian dari sisi perkembangan pembangunan desa, Kecamatan Ciwidey belum memiliki satu Desa Mandiri pun [6]. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan [8]. Bentuk pembangunan yang memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah serta sumber daya manusia yang berbeda-beda adalah dengan konsep pusat pertumbuhan. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada (Tarigan, 2005). Salah satu alternatif upaya penataan ruang adalah dengan menetapkan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan untuk desa-desa disekitarnya (Taylor, 1981). Pembangunan lain yang sedang dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah berusaha membuat rancangan pembangunan yang mengedepankan otonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akibat dari adanya undang-undang tersebut desa mampu menata dan mendorong wilayahnya sesuai dengan karakteristik dari desa itu sendiri serta menerapkan konsep yang sejalan dengan perkembangan pembangunan wilayah. Kemudian pada era digitalisasi ini, terdapat cara untuk merumuskan dan melaksanakan pengembangan maupun pembangunan suatu wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu dengan menggunakan konsep smart city (untuk wilayah perkotaan) atau smart village (untuk wilayah pedesaan).

Menurut Giffinger, R., dkk, Smart City merupakan sebuah kota yang terdepan di dalam perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat, yang mana keseluruhan dibangun secara cerdas, independen dan memiliki kesadaran dari masyarakatnya. Sedangkan Smart Village (Smart Village Ekosistem) adalah sejumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat desa dan sektor bisnis dengan cara yang efektif dan efisien [13]. Selain itu smart village adalah Desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dengan memberdayakan sumber daya manusianya (pemuda desa) melalui sumber daya alam lokal yang tersedia dan

teknologi yang tepat [9].

2. Landasan Teori

Ide awal tentang pusat pertumbuhan (growth poles) mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada tahun 1955. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan para ekonom pada waktu itu seperti Casel (1927) dan Schumpeter (1951) [11] yang berpendapat bahwa transfer pertumbuhan antar wilayah umumnya berjalan lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan capital tidaklah selalu proporsional antar waktu. Akan tetapi kenyataan menunjukkan kondisi dimana transfer pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya tidaklah lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan-keuntungan lokasi [11].

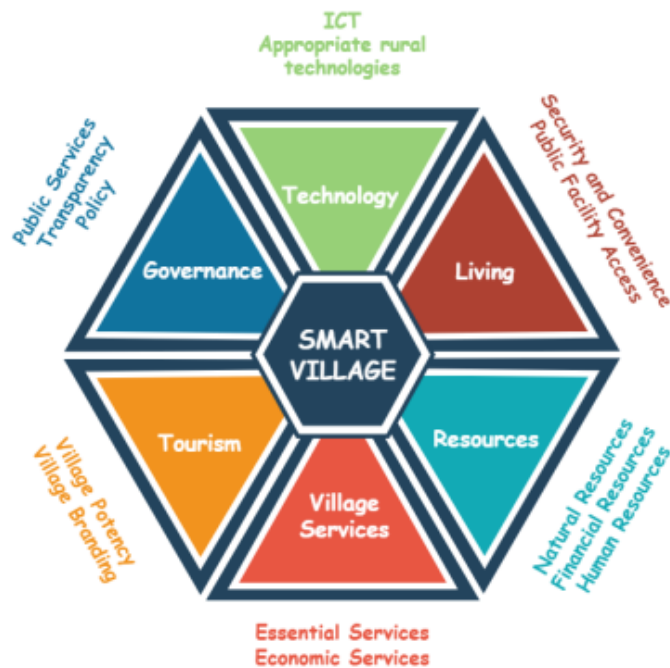
Departemen Pekerjaan Umum (2006) [5] menjelaskan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah suatu desa yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan SDA, dengan fungsi dan perannya sebagai berikut :

1. Merupakan Jasa Pelayanan resmi tingkat desa atau kecamatan
2. Merupakan pusat jasa pelayanan social.
3. Sebagai tempat permukiman
4. Mempunyai potensi sebagai tempat kegiatan ekonomi daerah penunjangnya (*Hinterland*)
5. Mempunyai akses yang baik menuju dan dari daerah hinterlandnya

Dengan kata lain DPP merupakan desa-desa yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan dan merupakan satuan permukiman desa yang belum termasuk klasifikasi perkotaan. DPP merupakan usaha mengkonsolidasikan dan pengantisipasi kebutuhan masyarakat desa yang langsung dapat memacu tumbuh berkembangnya potensi dan usaha ekonomi desa tersebut [5].

Konsep dan praktek desa cerdas mengemuka untuk mewujudkan dua tujuan yang telah disebutkan di awal. Desa cerdas dipahami sebagai sesuatu yang penting, karena menjadi piranti dalam mempercepat akselerasi pembangunan [10]. Desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat perdesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri serta pada saat yang sama terdapat pula usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayanan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik [10].

Untuk mengembangkan desa cerdas di Indonesia perlu mempertimbangkan bahwa perbedaan situasi dan kondisi setiap wilayah mempengaruhi usaha mewujudkan desa cerdas. Adapun konsep smart village yang telah dirumuskan berdasarkan objek atau realita wilayah di Indonesia. Pada hasil penelitiannya pengembangan model desa pintar tidak hanya disusun dari tinjauan literatur dalam studi sebelumnya, tetapi ada kebutuhan untuk peraturan yang mendukung pelaksanaan smart village. Smart village adalah konsep pengembangan masyarakat di dalam komunitas itu sendiri untuk melakukan sesuatu yang cerdas/bijak dalam mengatasi berbagai masalah melalui ketersediaan sumber daya secara efisien di daerah yang dihuni oleh orang-orang yang membentuk komunitas mereka sendiri yang terkait dengan adat setempat dan norma yang diterapkan [10]. Model smart village yang diusulkan terdiri dari enam dimensi: 1) Pemerintahan atau Tata Kelola, 2) Teknologi, 3) Sumber Daya, 4) Layanan Desa, 5) Kualitas Hidup, dan 6) Pariwisata. Model yang diusulkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Model *Smart Village*

Sumber : Susanto dan Aziiza (2020)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis Struktur Desa Pusat Pertumbuhan

Dalam penentuan DPP menggunakan analisis aksesibilitas lokasi, analisis gravitasi, analisis skalogram dan Indeks Sentralitas. Kemudian dari keempat analisis tersebut dilakukan skoring. Hasil analisis tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. Total 2 Skor Analisis Struktur DPP

No	Desa	Analisis				Total Skor
		Aksesibilitas Lokasi	Gravitasi	Skalogram	Indeks Sentralitas	
1	Ciwidey	6	5	5	5	21
2	Lebakmuncang	5	1	2	2	10
3	Nengkelan	3	1	1	1	6
4	Panundaan	6	1	1	1	9
5	Panyocokan	5	5	1	1	12
6	Rawabogo	2	1	1	1	5
7	Sukawening	4	2	1	1	8

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, Desa Ciwidey dengan jumlah skor paling tinggi dengan total skor 21. Hal tersebut mengindikasikan Desa Ciwidey dapat dijadikan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Utama (DPP-U) atau pusat pertumbuhan primer, Desa Panyocokan dengan total skor 12 menjadikan desa ini sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif atau pusat pertumbuhan sekunder, dan untuk desa lainnya sebagai titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya dengan fungsi menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

Analisis Kondisi Potensial *Smart Village*

Berdasarkan hasil klasifikasi data dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, maka didapatkan kondisi sebagai berikut :

Tabel 3. Kondisi Potensial Dikembangkan

Desa \ Dimensi	Pemerintahan	Teknologi	Sumber Daya
Ciwidey	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Lebakmuncang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Nengkelan	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi
Panundaan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Panyocokan	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rawabogo	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sukawening	Rendah	Sedang	Sangat Rendah

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel 4. Kondisi Potensial Dikembangkan (Lanjutan)

Desa \ Dimensi	Layanan Desa	Kualitas Hidup	Pariwisata
Ciwidey	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Lebakmuncang	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang
Nengkelan	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Panundaan	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Panyocokan	Rendah	Rendah	Tinggi
Rawabogo	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah
Sukawening	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Analisis Cluster Metode Hirarki

Konsep dari metode hirarkis ini dimulai dengan menggabungkan 2 obyek yang paling mirip, kemudian gabungan 2 obyek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih obyek yang paling mirip lainnya. Proses clustering ini pada akhirnya akan ‘menggumpal’ menjadi satu cluster besar yang mencakup semua obyek. Metode ini disebut juga sebagai “metode aglomerativ” yang digambarkan dengan dendogram (Hening Metri, 2012). Pada analisis ini memasukan data hasil klasifikasi untuk membentuk kelompok atau hirarki desa, hasil analisis membentuk hirarki desa di Kecamatan Ciwidey sebagai berikut :

Tabel 5. Struktur Desa *Smart Village*

No	Desa	Hirarki
1	Ciwidey	I
2	Lebakmuncang	II
3	Rawabogo	III
4	Panundaan	III
5	Panyocokan	III
6	Nengkelan	III
7	Sukawening	III

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Pada analisis cluster metode hirarki yang mengukur jarak yang paling kecil, maka untuk nilai jarak yang semakin besar menunjukkan hirarki yang paling tinggi. Desa Ciwidey yang merupakan Desa dengan hirarki yang paling tinggi menjadikan perkembangan konsep smart village di desa ini lebih potensial dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Ciwidey.

Analisis Hubungan DPP dengan *Smart Village*

Pada analisis ini menggunakan analisis korelasi tata jenjang spearman untuk melihat tingkat hubungan keamatan Desa Pusat Pertumbuhan yang menggunakan teknis analisis yang biasa digunakan dengan konsep *smart village*. Persamaan dari kedua teknik tersebut adalah desa yang dijadikan DPP atau hirarki I dan perkembangan atau daerah paling berpotensi penerapan *smart village* adalah Desa Ciwidey. Perbedaannya adalah desa yang dijadikan sebagai hirarki II (DPP-Alternatif) dalam analisis DPP adalah Desa Panyocokan dan desa lain pada pusat tersier, sedangkan dalam konteks konsep *smart village* adalah Desa Lebakmuncang dan desa lain pada cluster ketiga.

Tingkat perkembangan *smart village* dipengaruhi oleh tinggi ketersediaan sarana dan prasarana, lokasi desa yang strategis dan hirarki pelayanan suatu wilayah. Namun tidak dipengaruhi oleh interaksi suatu wilayah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai matrik korelasi cluster metode hirarki dengan analisis lain. Hubungan indikator *smart village* dengan desa pusat pertumbuhan pada kategori sedang (0,464) yang menandakan dapat saling mempengaruhi satu sama lain di dalam perkembangan suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Korelasi Spearman

	Analisis DPP	Analisis <i>Smart Village</i>
Analisis DPP	1,000	,464
Analisis <i>Smart Village</i>	,464	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel 7. Matrik Korelasi Spearman Tiap Analisis

	Aksesibilitas Lokasi	Gravitasi	Skalogram	Indeks Sentralitas	Cluster Metode Hirarki
Aksesibilitas Lokasi	1	0,655	0,587	0,473	0,436
Gravitasi	0,655	1	0,270	0,179	-0,036
Skalogram	0,587	0,270	1	0,955	0,523
Indeks Sentralitas	0,473	0,179	0,955	1	0,643
Cluster Metode Hirarki	0,436	-0,036	0,523	0,643	1

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Struktur Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang ada di Kecamatan Ciwidey sesuai dengan hasil analisis dari aksesibilitas lokasi, gravitasi, skalogram dan indeks sentralitas, maka dihasilkan desa yang dijadikan pusat pertumbuhan adalah Desa Ciwidey. Pemilihan Desa tersebut dikarenakan memiliki lokasi yang strategis, interaksi penduduk yang tinggi, serta pelayanan yang tinggi dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Ciwidey. Kemudian, desa yang memiliki kondisi lokasi strategis dan interaksi penduduk yang tinggi, namun memiliki kekurangan dalam tingkat pelayanan wilayah adalah Desa Panyocokan, maka desa ini dijadikan Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif. Dan desa lainnya dijadikan sebagai titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya dengan fungsi menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

2. Karakteristik dan struktur desa berdasarkan konsep smart village di Kecamatan Ciwidey membentuk desa yang berpotensi sangat tinggi dari indikator yang ada adalah Desa Ciwidey, pengoptimalisasian perlu dilakukan di Desa Lebakmuncang. Sedangkan desa yang memerlukan peningkatan diberbagai indikator yang ada adalah Desa Panundaaan, Desa Panyocokan, Desa Nengkelan, Desa Rawabogo dan Desa Sukawening. Dari uraian tersebut Desa Ciwidey berada pada Hirarki I, Desa Lebakmuncang Hirarki II dan desa lainnya berada pada hirarki III.
3. Hubungan antara skor total dalam analisis DPP dengan smart village analisis cluster metode hirarki berada dalam kategori sedang dengan nilai 0,464. Hal tersebut menandakan bahwa lokasi antara Desa Pusat Petumbuhan dengan perkembangan smart village di wilayah tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Kajian indikator Smart village dengan analisis cluster metode hirarki memiliki nilai koefisien yang hubungannya erat dengan analisis lain, selain analisis gravitasi. Hal tersebut bermakna bahwa hirarki pelayanan yang tinggi dengan kelengkapan sarana serta lokasi yang strategis umumnya memiliki tingkat pengembangan konsep smart village yang tinggi pula.

5. Saran

Saran Teoritis

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di dalam pembangunan wilayah perdesaan atau desa khususnya untuk menentukan Pusat Pertumbuhan dapat menggunakan indikator *smart village*, yang menjadikannya model baru sebagai pendekatan pembangunan desa aspek keruangan. Penggunaan model tersebut menyelaraskan potensial desa dengan perkembangan global saat ini khususnya teknologi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa, sehingga kualitas kehidupan masyarakat desa meningkat.
2. Penelitian selanjutnya perlu dilakukannya kajian atau analisis lanjutan untuk memberikan solusi mengenai peningkatan hirarki yang dimiliki suatu wilayah, misal dari Hirarki III ke Hirarki II atau Hirarki II ke Hirarki I.

Saran Praktis

Dengan adanya kajian ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pemerintah terkait khususnya Kecamatan Ciwidey dan Kabupaten Bandung dalam mengembangkan wilayah perdesaan dengan konsep smart village guna menunjang pembangunan Masterplan Smart City Kabupaten Bandung. Kemudian bagi stakeholder lainnya yang terkait diharapkan dapat menerapkan lebih lanjut untuk melaksanakan strategi pengembangan wilayah perdesaan dalam pusat pertumbuhan yang mengikuti perkembangan global dan menjadikan wilayah pedesaan sebagai daya tarik untuk ditinggali baik dilihat dari sumber daya lokal, intervensi teknologi, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- [1] Agustina, Isnaeni & Artiningsih. 2017. *Evaluasi Implementasi Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey Menggunakan Logic Models*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [2] Danastri, Sasya. 2011. *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [3] jabar.bps.go.id, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”, Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2019, <
<https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>> [diakses pada 12 Juli 2019]
- [4] Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2017-2019 Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- [5] Kusuma, Ichwan Hari, dkk. Tanpa Tahun. *Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*. Universitas Bung Hatta. Padang.
- [6] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciwidey Tahun 2017.
- [7] Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
- [8] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- [9] Ramachandra. 2015. *Smart Village Framework*. Indian Institute of Science. Bangalore. India.
- [10] Santoso, Anang Dwi, dkk. 2019. *Desa Cerdas : Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Penerbit : Center for Digital Society. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- [11] Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional dalam Teori dan Aplikasi*. Penerbit : Badouse Media. Padang.
- [12] Susanto & Aziiza. 2020. *The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)*. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- [13] Viswanadham dan Vedula. 2010. *Design of Smart Villages*. Indian School of Business. India.